

Putu Liana Anggreni⁽¹⁾
Ni Putu Yeni Yuliantari⁽²⁾

ABSTRACT

PENDAHULUAN

Menurut Rakhmat (2018), akuntabilitas publik secara umum meliputi partisipasi dari lembaga-lembaga publik dan birokrasi dalam mekanisme pengawasan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Sementara itu, Mardismo (2018) mengartikan akuntabilitas publik sebagai proses penyampaian dan pengungkapan informasi terkait kegiatan serta kinerja

keuangan pemerintah kepada para pemangku kepentingan yang membutuhkan laporan tersebut. Sulfiati (2019) menambahkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah mencerminkan tanggung jawab dalam penggunaan dana sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Jika pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabel, maka sekolah akan memperoleh kepercayaan dan apresiasi positif dari masyarakat maupun pemerintah.

Menurut Krina (2019), transparansi adalah asas yang memberikan jaminan bagi publik untuk menjangkau data terkait tata kelola pemerintahan, mulai dari tahap perencanaan kebijakan hingga capaian hasilnya. Prinsip ini menuntut keterbukaan informasi yang utuh guna memicu kolaborasi serta meniadakan agenda tersembunyi, sehingga seluruh proses penyelenggaraan negara tetap jelas dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Menurut Mardiasmo (2018:18), transparansi mencerminkan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan. ransparansi dalam tata kelola keuangan di institusi pendidikan merupakan faktor krusial bagi peningkatan mutu sekolah. Standar kualitas yang terjaga dengan baik akan memicu kepercayaan dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti orang tua, masyarakat, hingga pemerintah, guna menyukseskan implementasi program-program pendidikan.

Melalui Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022, pemerintah menetapkan standar teknis penggunaan Dana BOS Reguler yang bertumpu pada asas keterbukaan dan pertanggungjawaban. Kebijakan ini mewajibkan setiap proses manajemen dana pendidikan dilakukan secara transparan demi memenuhi standar tata kelola yang baik. Prinsip akuntabilitas mengharuskan penggunaan Dana BOS dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Institusi pendidikan memiliki kewajiban untuk merumuskan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) secara komprehensif. Selain itu, sekolah harus mendokumentasikan serta melaporkan setiap pemanfaatan anggaran secara mendalam, sekaligus menjamin ketersediaan laporan yang memenuhi standar audit dari instansi berwenang. Laporan-laporan ini harus disampaikan dengan jelas dan dapat diperiksa oleh pihak terkait, seperti dinas pendidikan atau auditor eksternal. Hal ini memastikan bahwa semua penggunaan Dana BOS dilakukan dengan cara yang sesuai dan benar.

Prinsip transparansi mengharuskan pengelolaan Dana BOS dilakukan dengan jelas dan bisa dijangkau oleh semua pihak yang berhubungan. Sekolah diwajibkan untuk mempublikasikan laporan penggunaan dana, baik itu penerimaan maupun pengeluaran, di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan informasi sekolah atau media lainnya yang tersedia. Transparansi ini bertujuan untuk menghadirkan kejelasan informasi kepada masyarakat, termasuk

Adanya temuan penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan yang terjadi di SMK Negeri 1 Klungkung. Berdasarkan laporan yang dikutip dari balipost.com pada 20 Juni 2023, hasil pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Klungkung mengungkapkan adanya pendanaan ganda dalam satu kegiatan, yaitu melalui Dana BOS dan Dana Komite Sekolah. Penyalahgunaan dana pendidikan ini tercatat dari pemeriksaan Dana BOS pada tahun 2020 hingga 2022, dengan kerugian mencapai Rp 700.000.000. Selain itu, terdapat kesalahpahaman antara pihak pemerintah, sekolah, dan masyarakat mengenai aturan penggunaan Dana BOS, seperti pengadaan LKS. Masyarakat berpendapat bahwa Dana BOS dapat digunakan untuk membeli LKS, walaupun sebenarnya hal ini sudah dilarang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2 Tahun 2022, yang melarang pemanfaatan Dana BOS untuk berperan sebagai distributor atau pengecer dalam proses pembelian barang, termasuk buku. Isu ini mencerminkan lemahnya sosialisasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat mengenai peraturan dan ketentuan penggunaan Dana BOS. Kurangnya keterbukaan dan tanggung jawab dari pihak sekolah dalam pengelolaan dana keuangan menjadi salah satu faktor utama timbulnya masalah tersebut. Tidak melibatkan orang tua dalam rapat atau musyawarah mengenai penggunaan dana keuangan sekolah, serta tidak adanya media yang transparan untuk pelaporan penggunaan dana, memperburuk situasi ini.

Grand teori yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu Teori *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut Accounting (2019), terdapat empat komponen utama dalam konsep GCG yang sangat penting, yaitu *fairness, transparency, accountability*, dan *responsibility*. Keempat elemen ini memiliki fungsi penting dalam membangun sistem manajemen yang efektif dan dapat diandalkan, baik di lingkungan perusahaan maupun institusi pendidikan. Penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang dapat menyesatkan atau tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), khususnya aspek transparansi dan akuntabilitas, dalam manajemen dana BOS di lingkungan sekolah menjadi jaminan atas terciptanya efisiensi anggaran. Penerapan asas-asas ini memastikan bahwa setiap

alokasi dana dipergunakan secara tepat guna sesuai dengan target sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, teori GCG memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis bagaimana pengelolaan dana BOS di SMK Negeri 1 Klungkung dapat dilaksanakan dengan cara yang lebih jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan memiliki rasa tanggung jawab, serta menciptakan keyakinan dari masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Rakhmat (2018) mengemukakan bahwa dalam cakupan yang luas, Akuntabilitas publik melibatkan partisipasi institusi publik dan struktur birokrasi dalam suatu mekanisme pengawasan yang berasal dari dalam maupun luar organisasi. Mardiasmo (2018) mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai tanggung jawab untuk memaparkan dan menyajikan data terkait seluruh kegiatan serta capaian finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Hal ini menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan melalui keterbukaan informasi kinerja. Sementara itu, Mahmudi (2019:9) menjelaskan bahwa akuntabilitas dalam bidang pendidikan merujuk pada kemampuan sekolah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Tujuan utama dari akuntabilitas pendidikan adalah membangun kepercayaan publik terhadap sekolah. Kepercayaan masyarakat yang tinggi merupakan kunci untuk mendorong peran serta yang lebih luas dalam tata kelola sekolah. Partisipasi aktif akan tumbuh seiring dengan meningkatnya kredibilitas sekolah di mata publik. Dengan demikian, institusi pendidikan dianggap bukan sekadar tempat belajar, melainkan juga sebagai motor penggerak dan sumber transformasi sosial. Oleh karena itu, pihak yang mengelola pendidikan perlu menyadari betapa pentingnya untuk mempertanggungjawabkan kinerja mereka kepada masyarakat demi meningkatkan kepercayaan dan partisipasi komunitas secara berkelanjutan.

Transparansi didefinisikan sebagai prinsip yang menjamin hak publik untuk menjangkau informasi operasional pemerintah, mencakup fase perencanaan hingga capaian kebijakan (Krina, 2019). Asas ini menuntut ketiadaan agenda tersembunyi melalui penyediaan data komprehensif guna membangun kerja sama yang terbuka. Dalam manajemen finansial sekolah, keterbukaan tersebut memicu lahirnya akuntabilitas horizontal antara institusi dan masyarakat, yang pada akhirnya membentuk lembaga pendidikan yang bersih, berdaya guna, serta responsif terhadap aspirasi publik. Sebagai wujud tanggung jawab dalam pelaksanaan dan penggunaan Dana BOS Reguler, sekolah diwajibkan untuk menyampaikan dokumen pendukung transparansi secara menyeluruh. Dokumen yang harus dipublikasikan mencakup laporan realisasi penggunaan dana dari setiap sumber, serta rekapitulasi penggunaannya. Laporan tersebut perlu disampaikan setiap

Manajemen finansial di lembaga pendidikan melibatkan serangkaian proses sistematis, mulai dari perencanaan dan alokasi hingga pemanfaatan serta pelaporan anggaran. Tujuannya adalah memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal, transparan, dan akuntabel demi menunjang efektivitas kegiatan belajar mengajar. Salah satu instrumen utamanya adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yaitu subsidi pemerintah pusat untuk mendukung biaya operasional non-personalia pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Jumlah dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa dikalikan dengan satuan biaya (unit cost) yang telah ditetapkan. Kehadiran dana BOS diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mencakup anggaran dan biaya dari seluruh program atau kegiatan sekolah, baik strategis maupun rutin, yang langsung dikelola oleh pihak sekolah. Sementara itu, dana Komite Sekolah adalah bentuk dukungan pendanaan dari orang tua siswa yang dikumpulkan sebagai solusi atas keterbatasan anggaran sekolah.

1. Fleksibel merujuk pada keleluasaan dalam tata kelola anggaran yang pelaksanaannya diselaraskan dengan kebutuhan riil di tingkat satuan pendidikan.
2. Efektif berarti pengelolaan dana memiliki tujuan untuk menghasilkan hasil dan dampak yang baik bagi mutu pendidikan.
3. Efisien berarti pengelolaan dana ditujukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dengan pengeluaran yang serendah mungkin.
4. Akuntabel yakni Pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
5. Transparan yakni Pengelolaan dana harus terbuka dan mengakomodasi aspirasi pemangku kepentingan.

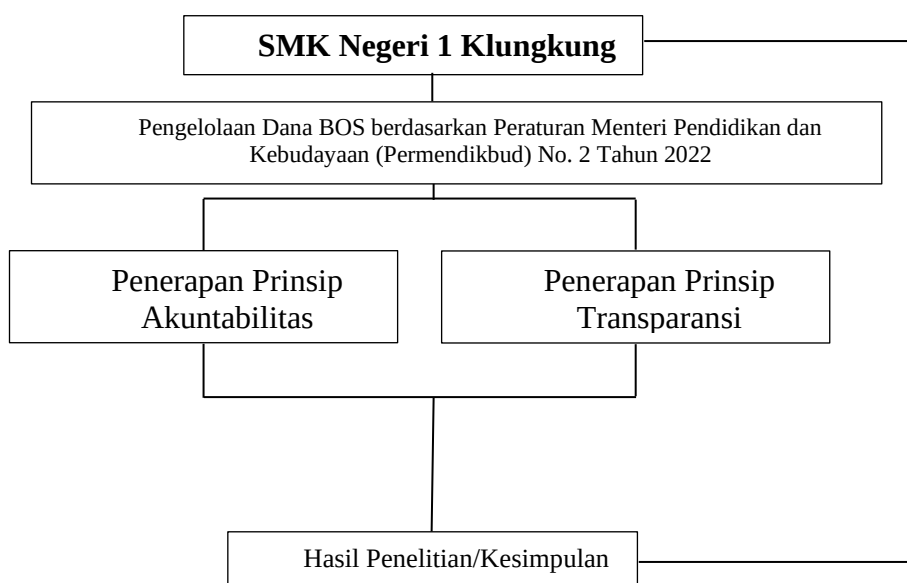
253 | Hita Akuntansi dan Keuangan

Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Klungkung yang dilakukan dalam penelitian ini, mengacu pada prinsip-prinsip tersebut, di mana:

- 1) Akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban yang disusun secara sistematis serta disampaikan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.
- 2) Transparansi tercapai dengan adanya keterbukaan dalam perencanaan dan pelaporan dana yang dipublikasikan kepada masyarakat melalui papan informasi sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi langsung terhadap fenomena di lokasi penelitian. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang dihimpun dari subjek penelitian, yang selanjutnya akan disaring sesuai dengan fokus utama kajian. Berdasarkan tahapan tersebut, dikembangkanlah sebuah kerangka pemikiran yang digunakan sebagai pijakan untuk menjawab rumusan masalah serta merumuskan solusi atas topik yang diteliti, yakni sebagai berikut:



Jenis dan sumber data yang digunakan di sini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini dihimpun melalui teknik wawancara mendalam dengan para informan kunci, yang meliputi Kepala Sekolah, Bendahara, Staf Manajemen, Komite Sekolah, serta perwakilan Orang Tua Siswa. Sementara itu, data sekunder didapatkan laporan keuangan sekolah dan sumber lainnya yang berasal dari buku, jurnal atau dokumen tentang dana keuangan sekolah. Oleh karena itu, metode pengumpulan informasi dalam studi ini menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Penyusunan pembukuan yang akurat dan penyampaian laporan secara tepat waktu menunjukkan bahwa SMK Negeri 1 Klungkung telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik. Selain itu, tata kelola dokumentasi dan pencatatan finansial diselenggarakan secara efisien guna memfasilitasi pihak berwenang dalam melakukan peninjauan serta verifikasi terhadap laporan yang disajikan. Penelitian oleh Sutrisno dan Fitriana (2021) mengenai Pengelolaan anggaran BOS di daerah Sleman memperlihatkan bahwa walaupun ada pemahaman tentang arti pentingnya keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana pendidikan, masih ada kendala terkait dengan pelaporan yang kurang terbuka kepada pihak luar. Meskipun dana BOS digunakan sesuai dengan peruntukannya, belum ada platform yang cukup efektif untuk menyampaikan informasi terkait pengelolaan dana kepada masyarakat luas.

Transparansi dalam pengelolaan dana BOS di SMK Negeri 1 Klungkung dilakukan dengan menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai sumber dana, jumlah dana yang diterima, serta rincian penggunaan dana. Proses ini meliputi pengiriman data melalui papan informasi di institusi pendidikan serta pelaporan pemanfaatan anggaran yang dapat diperoleh oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Namun, meskipun informasi terkait penggunaan dana BOS telah disampaikan melalui papan pengumuman, ada beberapa tantangan dalam sosialisasi informasi kepada orang tua dan masyarakat. Beberapa pihak masih mengaku tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS.

sangat krusial untuk menciptakan keyakinan di antara institusi pendidikan, orang tua murid, pihak berwenang, dan masyarakat. SMK Negeri 1 Klungkung telah berusaha untuk menyediakan informasi yang diperlukan melalui berbagai media yang dimiliki, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar informasi dapat tersebar secara lebih merata dan lebih mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Penelitian yang dilakukan oleh Asrul dkk

Dengan demikian, meskipun SMK Negeri 1 Klungkung telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, masih ada sejumlah kendala dalam memberikan informasi yang efisien kepada masyarakat dan orang tua siswa, yang harus ditangani agar kepercayaan dan keterlibatan publik dapat meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 1 Klungkung, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana tersebut telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, baik dari aspek akuntabilitas maupun transparansi.

- 256 | Hita Akuntansi dan Keuangan

pengumuman di sekolah dan laporan realisasi yang dipublikasikan. Akan tetapi, ada masalah dalam menyampaikan informasi dengan baik, seperti yang diungkapkan oleh seorang orang tua siswa yang mengatakan bahwa ia belum mengetahui tentang laporan realisasi dana. Keterbatasan dalam sosialisasi dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap transparansi menunjukkan bahwa meskipun sudah ada langkah keterbukaan, masih diperlukan peningkatan dalam komunikasi dan edukasi kepada masyarakat serta orang tua siswa.

Berdasarkan simpulan diatas maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi mahasiswa, studi ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian mendatang melalui perluasan jumlah sampel serta pengembangan model penelitian dengan mengintegrasikan variabel tambahan. Hal tersebut bertujuan agar temuan yang dihasilkan mampu merepresentasikan kondisi lapangan secara lebih akurat dan komprehensif.
- 2) Bagi SMK Negeri 1 Klungkung, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem tata kelola keuangan sekolah, khususnya melalui penguatan aspek transparansi serta akuntabilitas. Sekolah diharapkan lebih aktif dalam meningkatkan transparansi penggunaan dana BOS, misalnya dengan melakukan sosialisasi dan memberikan informasi secara menyeluruh kepada guru, komite sekolah, dan wali murid mengenai RKAS yang harus direalisasikan melalui rapat, serta mempublikasikan penggunaan dana BOS secara terbuka di papan informasi, terutama untuk wali murid yang saat ini masih kurang sadar dalam mengawasi anggaran sekolah.
- 3) Bagi Pemerintah, perlu lebih memperhatikan masalah keterlambatan pencairan dana BOS. Pemerintah disarankan untuk memperketat pengawasan terhadap pelaporan pertanggungjawaban dana BOS agar tidak terjadi penyelewengan, sekaligus menjamin bahwa implementasinya mampu memberikan kontribusi nyata terhadap akselerasi mutu pendidikan di institusi tersebut.

Daftar Pustaka

Andriani, Komang Erna, and Anantawikrama Tungga Atmadja. 2022 Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Peturunan dalam Kegiatan Piodalan Pura Khayangan Tiga di Desa Adat Alapsari Desa Jinengdalem. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 12.1: 91-98.

- Asmani, J. M. (2011). *Akuntabilitas dalam Pendidikan: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asmani, J. M. (2012). *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*. Yogyakarta: Diva Press.
- Asrul, dkk. (2023). "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tamacinna." *Jurnal Manuver: Akuntansi dan Manajemen*, 1(1), 76-83.
- Jubaedah, E., Lili, N., & Faozan, H. (2008). *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance*. Bandung: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. (2019). "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure." *Journal of Finance Economic*, 3, 305-360.
- Kemendikbud RI. (2020). *Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020: Pengelolaan Dana BOS*. Jakarta.
- Kemendikbudristek. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 terkait Juknis Pengelolaan Dana BOS*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2023). *Pedoman Pengelolaan Dana BOS Tahun 2023*. Diakses secara daring melalui .
- Krina, L. P. L. (2019). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Bappenas.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi ke-3)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Minarti, S. (2019). *Manajemen Berbasis Sekolah: Strategi Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Versi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pane, S. H. R. S., Marliyah, & Lubis, A. W. (2023). "Studi Akuntabilitas Dan Transparansi Manajemen Anggaran BOS Di MIS Perguruan Ubudiyyah Medan." *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 2(02).
- Rakhmat, A. (2020). "Studi Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup." *Jurnal Sinar Manajemen*, 7(1).
- Sari, D. M. I. P. (2022). "Analisis Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dana BOS di SLB Negeri 2 Denpasar." *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 103-117.

